



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR: 100.3.8/259/Ko.Hukum-G.9/2025
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 98);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 796);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi bahan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Agustus 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


ANWAR HAFID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : *W.30/259/PO-Hukum-G. 8/2025*
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Perintah	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau keterangan			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
1.	Raperda	Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Pejabat pengelola barang milik daerah - Perencanaan kebutuhan dan penganggaran - Pengadaan - Penggunaan - Pemanfaatan - Pengamanan dan pemeliharaan	Baru		- PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah			1. BPKAD 2. Biro Hukum	Tahun 2026	

8

			- Penilaian - Pemindahtanganan - Pemusnahan - Penghapusan - Penatausahaan - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian - Pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah - Barang milik daerah berupa rumah negara - Ganti rugi dan sanksi							
2.	Raperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Objek baru dan perubahan tarif pada retribusi daerah - Perubahan tarif pada pajak daerah	Baru		- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1. Bapenda 2. Perangkat Daerah terkait lainnya 3. Biro Hukum	Tahun 2026		

3.	Raperda	Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah	- Pengelolaan Pendidikan - Penyelenggaraan pendidikan		Ubah	- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional		1. Dinas Pendidikan 2. Biro Hukum	Tahun 2026	
4.	Raperda	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Wilayah Pertambangan	- Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Wilayah Pertambangan	Baru		- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral		1. ESDM 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas PM-PTSP 4. Biro Hukum	Tahun 2026	

